

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2001, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah diberlakukan otonomi daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. Visi pokok dari otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan bermuara pada upaya pemberdayaan (*empowering*) terhadap masyarakat setempat untuk menentukan sendiri jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran dan sistem penilaian hasil belajar, guru dan kepala sekolah, fasilitas dan sarana belajar untuk putra-putri mereka. Peran pemerintah baik diwakili oleh Departemen Teknis maupun oleh pemerintah daerah (pemda) di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi adalah memberikan dukungan baik berupa dana, fasilitas, dan ekspertis agar dapat terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermanfaat bagi pembangunan kehidupan riil di masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan mengacu pada standar mutu akademik secara nasional maupun internasional.

Dilihat dari visi tersebut, maka kata kunci dari otonomi daerah adalah "kewenangan" dan "pemberdayaan". Otonomi daerah di bidang pendidikan berusaha memberikan kembali pendidikan kepada masyarakat pemiliknya (daerah) agar hidup dari, oleh dan untuk masyarakat di daerah tersebut, atau berusaha memandirikan suatu lembaga atau suatu daerah untuk mengurus dirinya sendiri melalui pemberdayaan SDM yang ada di daerahnya. Sebagai konsekuensinya, maka sebagian besar sumber pembiayaan nasional dilimpahkan lebih banyak ke daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan perekonomian daerah yang berbeda-beda.

Pemerintah telah mempercepat pencanangan Millenium Development Goals yang semula dicanangkan tahun 2020 dipercepat menjadi 2015. Millenium Development Goals adalah era pasar bebas atau era globalisasi sebagai era persaingan mutu atau kualitas, siapa

yang berkualitas dialah yang akan maju dan mampu mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia, maka posisi dan peranan pendidikan sangat penting dan mendasar. Mulyasa (2003:15), mengatakan bahwa pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam mengemukakan pesan-pesan kontribusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (National Character Building).

Otonomi penyelenggaraan pendidikan tersebut pada gilirannya berimplikasi kepada perubahan sistem manajemen pendidikan dari pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Sebagai implikasi selanjutnya ialah dikembangkannya pendidikan yang demokratis dan non-monopolistik dalam menentukan jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran dan sistem penilaian hasil belajar, fasilitas dan sarana belajar, dan lain-lain. Bersamaan dengan otonomi penyelenggaraan pendidikan tersebut, maka manajemen yang dikembangkan lebih mengarah pada manajemen berbasis sekolah. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, yakni model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan, orangtua peserta didik, dan masyarakat) atau stakeholders untuk meningkatkan mutu sekolah.

Notoatmodjo (1998:89), mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Melihat hal tersebut diatas, mutu atau kualitas pendidikan di suatu negara tentu sangat menentukan mutu atau kualitas sumber daya manusia yang dihasilkannya. Bangsa Indonesia juga harus memperhatikan mutu pendidikan nasional Indonesia yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bertahan dan bersaing ditengah-tengah era globalisasi ini. Untuk itu

kualitas sumber daya manusia seharusnya menjadi prioritas dalam sistem pendidikan nasional dan kebijakan pendidikan nasional kita.

Di antara otonomi yang lebih besar diberikan kepada sekolah adalah menyangkut pengembangan kurikulum, yakni kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (sekolah). Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) Undang-Undang No. 20/3003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan tersebut adalah kurikulum, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Dalam hal ini, kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat secara sentralistik, dan diberlakukan bagi seluruh anak bangsa diseluruh tanah air Indonesia. Dalam hal ini, setiap sekolah tinggal menjabarkan kurikulum tersebut di sekolah masing-masing, dan biasanya yang banyak berkepentingan adalah guru. Tugas guru dalam kurikulum yang sentralistik ini adalah menjabarkan kurikulum yang dibuat oleh pusat (pusat kurikulum/puskur, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ke dalam satuan pelajaran sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Dalam manajemen berbasis sekolah dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan sebagian besar kewenangan penyelenggaraan pendidikan diberikan kepada sekolah, bukan berarti seluruh peran pusat/sentral dihapuskan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan (sekolah).

Cukup banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya implementasi manajemen pengembangan KTSP yaitu: (1) kemampuan menganalisa dan mengembangkan standar kompetensi kelulusan (SKL) dan Standar Isi, (2) kemampuan meningkatkan kreativitas guru dan siswa, (3) kurangnya pemahaman tentang KTSP, (4) kemampuan dalam proses belajar mengajar, (5) kemampuan merumuskan visi dan misi sekolah, (6) kemampuan menyesuaikan metode/alat terhadap proses belajar mengajar yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan.

Adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pengembangan KTSP dalam proses belajar mengajar yaitu; (1) kebutuhan berprestasi; (2) iklim sekolah; (3) status ekonomi atau insentif; (4) aspirasi terhadap kemajuan; (5) keamanan dan perlindungan; (6) pelaksanaan manajemen sekolah; (7) gaya kepemimpinan kepala sekolah; (8) pembinaan guru oleh kepala sekolah; (9) sarana dan prasarana.

Demikian halnya dengan pengembangan pelaksanaan KTSP di SD Negeri No. 064014 Kecamatan Medan Petisah diduga belum terlaksana sesuai dengan tujuan KTSP. Kurangnya pemahaman para penyelenggara, dan para pelaksana, termasuk guru, kepala sekolah di SD Negeri 064014 terhadap pengembangan KTSP. Dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum di SD Negeri 064014 masih berpedoman pada kurikulum sebelumnya. Jadi cara pengajaran paradigma lama masih dipertahankan oleh sebahagian guru di SD Negeri 064014, dengan melaksanakan pembelajaran berdasarkan urutan bab dalam buku teks, serta menggunakan buku teks sebagai satu-satunya acuan dalam mengajar.

Implementasi manajemen pengembangan KTSP di SD Negeri 064014 belum terealisasi sebagaimana mestinya karena kurangnya informasi tentang prinsip-prinsip pengembangan KTSP yaitu sebagai berikut :

1. **Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.** Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk dikembangkan potensinya agar disesuaikan dengan potensi,

- kebutuhan, perkembangan dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.
2. Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik.
 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis.
 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.
 5. Menyeluruh dan berkesinambungan.
 6. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Faktor-faktor penyebab pengembangan KTSP tidak terlaksanakan di SD Negeri No. 064014 dapat diatasi dengan usaha-usaha sebagai berikut: (1) sosialisasi KTSP di sekolah; (2) menciptakan suasana yang kondusif; (3) mengembangkan fasilitas dan sumber belajar; (4) membina disiplin, (5) mengembangkan kemandirian kepala sekolah; (6) mengubah paradigma (pola pikir) guru di SD Negeri 064014. Faktor-faktor penyebab yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan pengembangan KTSP di SD Negeri 064014 yaitu: menganalisis, dan mengembangkan standar kompetensi kelulusan (SKL), merumuskan visi dan misi, serta merumuskan tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, mengembangkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga kependidikan (guru) sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dan mengidentifikasi fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk memudahkan pembelajaran. Pengembangan KTSP antara lain menggunakan pendekatan KBK yang memiliki ciri-ciri: (1) menitikberatkan pencapaian target (attainment

targets) kompetensi daripada penguasaan materi; (2) lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan (3) memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, esensi pengembangan KTSP ialah "mengembangkan pendidikan yang demokratis dan non-monopolistik." Karena itulah, kurikulum yang dikembangkan di pusat cukup sebagai rambu-rambu umum tentang standar kompetensi lulusan yang harus dicapai serta standar isi. Di pusat tidak perlu sampai mengatur urutan topik per bulan/minggu dan seterusnya, yang diberlakukan untuk sekolah di daerah, apalagi sampai memaksakan suatu metode dan teori mengajar tertentu.

Pada awalnya pengembangan kurikulum banyak menggunakan konsep lama, dimana kurikulum dipandang hanya sebatas kumpulan isi mata pelajaran atau daftar materi pokok yang ditawarkan ke peserta didik dalam menyelesaikan suatu program belajar dalam satuan pendidikan tertentu. Namun, dengan otonomi pendidikan dan sejalan dengan tuntutan perubahan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan kemampuan daya saing dalam kehidupan manusia, pengembangan kurikulum tidak hanya dipandang sebatas deretan mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik, tetapi memiliki makna atau pengertian yang lebih luas, yakni apa saja yang dialami peserta didik atau segala upaya (rekayasa) yang diprogramkan sekolah dalam membantu mengembangkan potensi peserta didik melalui pengalaman belajar yang potensial untuk mencapai visi, misi, tujuan dan hasil yang diinginkan oleh satuan pendidikan baik dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah (Saylor & Alexander, 1979)

Konsep tersebut berimplikasi terhadap pengembangan model dan pendekatan kurikulum yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Model kurikulum merupakan wujud rancangan khusus yang menggambarkan struktur kurikulum yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan oleh satuan pendidikan berdasarkan analisis terhadap teori, pendekatan, prinsip, dan kondisi internal maupun eksternal pendidikan. KTSP yang sekarang

disosialisasikan untuk dapat diimplementasikan tersebut merupakan salah satu pilihan model kurikulum yang saat ini dipilih guna memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan iptek, kondisi pendidikan di seluruh wilayah NKRI, serta semangat otonomi pendidikan di Indonesia.

Disisi lain, studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan pelaksanaan implementasi manajemen pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SD Negeri No. 064014 dimana peneliti meneliti bagaimana implementasi pengembangan KTSP yang dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar tersebut. Karena SD Negeri No. 064014 merupakan salah satu sekolah dasar yang mempunyai mutu dan disiplin di Kecamatan Medan Petisah tetapi dalam hal prinsip pengembangan KTSP yang sebenarnya belum optimal dilakukan dalam proses pembelajaran. Dan sangat penting bagi peneliti mengetahui cara mengoptimalkan pengembangan KTSP sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan KTSP yang sebenarnya, dan ini merupakan tugas kepala sekolah SD Negeri No. 064014 untuk mensosialisasikannya untuk guru-guru SD Negeri No.064014 Kecamatan Medan Petisah.

Berdasarkan fakta diatas yaitu pelaksanaan pengembangan KTSP yang kurang maksimal, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: "Implementasi Manajemen Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SD Negeri No. 064014 Kecamatan Medan Petisah",

B. Fokus Penelitian

Dari uraian pada latar belakang, tampak bahwa adanya implementasi manajemen pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dilaksanakan di SD Negeri No. 064014 Kecamatan Medan Petisah, dimana pada jenjang pendidikan dasar sangat perlu dasar pendidikan yang kuat dan sebagai pembentukan pola pikir peserta didik yang kreatif dan inovatif. Berdasarkan pemikiran tersebut penelitian ini difokuskan pada masalah

"Implementasi Manajemen Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SD Negeri No. 064014 Kecamatan Medan Petisah."

C. Masalah Penelitian

Fokus masalah penelitian yang telah dirumuskan tersebut memunculkan permasalahan secara umum yaitu: Bagaimana Implementasi Manajemen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SD Negeri No. 064014 Kecamatan Medan Petisah ?

Dari permasalahan umum dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi warga sekolah menyusun perencanaan program pembelajaran di sekolah dalam implementasi manajemen pengembangan KTSP di SD 064014 ?
2. Sejahteramana transparansi proses pengembangan KTSP dalam perencanaan program pembelajaran dalam implementasi manajemen pengembangan KTSP di SD 064014 ?
3. Bagaimana akuntabilitas penyusunan pengembangan KTSP dan implementasi manajemen perencanaan program pembelajaran di SD Negeri 064014 ?
4. Bagaimana implementasi perencanaan program pembelajaran dalam pengembangan KTSP di SD Negeri 064014 ?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang kongkrit mengenai Implementasi Manajemen Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pembelajaran di SD Negeri No. 064014 Kecamatan Medan Petisah.

Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui partisipasi warga sekolah menyusun perencanaan program pembelajaran di sekolah dalam implementasi manajemen pengembangan KTSP di SD 064014.

2. Mengetahui transparansi proses pengembangan KTSP dalam perencanaan program pembelajaran dalam implementasi manajemen pengembangan KTSP di SD 064014.
3. Mendeskripsikan akuntabilitas penyusunan pengembangan KTSP dan implementasi manajemen perencanaan program pembelajaran di SD Negeri 064014.
4. Mendeskripsikan implementasi perencanaan program pembelajaran dalam pengembangan KTSP di SD Negeri 064014.

E. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka implementasi manajemen pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Disamping itu, akan memberikan kontribusi terhadap Manajemen Pengembangan KTSP di Sekolah Dasar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui implementasi manajemen pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholder (dinas pendidikan, pihak sekolah, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pihak pengelola pendidikan di Kecamatan Medan Petisah Kota Medan untuk mengoptimalkan sosialisasi implementasi manajemen pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pembelajaran di sekolah.